

## Penerapan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

**Shelvia Permata Sari**

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [shelviapermatasari23@gmail.com](mailto:shelviapermatasari23@gmail.com)

**Rida Ramadhani Ritonga**

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ramadanirida16@gmail.com](mailto:ramadanirida16@gmail.com)

**Budi Askhori Sirait**

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [budiaskhori28@gmail.com](mailto:budiaskhori28@gmail.com)

Jl. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan

**Abstract.** *Education plays an important role in the progress of the nation and state. In the development of the country's national education, it certainly requires policies that are able to make education more advanced. The role of policy itself is very crucial because it can help someone make decisions by providing information collected through research and analysis processes, classifying and clarifying problems that reveal discrepancies in goals and efforts, suggesting new possibilities and suggesting how to interpret ideas or ideas into a policy that is easy to implement and implemented. After policy making is carried out, of course it is necessary to apply or implement it to see the results of the policy. The purpose of implementing the policy itself is to set a direction so that the policy objectives can be implemented. The purpose of this study is to analyze the application of policies in the education system itself by reviewing the stages and approaches in implementing educational policies.*

**Keywords:** *Education policy, application of education policy*

**Abstrak.** Pendidikan memegang peranan penting terhadap kemajuan bangsa dan negara. Dalam pembangunan pendidikan nasional negara tentu memerlukan kebijakan yang mampu menjadikan pendidikan jadi lebih maju. Peran kebijakan sendiri sangat krusial karena dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan memberikan informasi yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan analisis, mengklasifikasi dan klarifikasi masalah yang mengungkap ketidaksesuaian tujuan dan upayanya, menyarankan kemungkinan baru dan menyarankan cara mengartikan ide atau gagasan kedalam suatu kebijakan yang mudah dilaksanakan dan diimplementasikan. Setelah pembuatan kebijakan dilaksanakan, tentu diperlukan penerapan atau implementasi untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari penerapan kebijakan sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan kebijakan-kebijakan dalam sistem pendidikan itu sendiri dengan meninjau tahapan serta pendekatan dalam penerapan kebijakan pendidikan.

**Kata kunci:** Kebijakan pendidikan, penerapan kebijakan pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah aktivitas yang sangat urgent bagi sebuah negara. Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi sarana utama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan potensi diri dan sanggup mengelolanya dengan totalitas dan bijaksana. Hal ini berhubungan dengan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan pranata sosial yang berwibawa dan teguh agar dapat memberdayakan warga Indonesia yang berkualitas dan proaktif untuk memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah.

Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang berarti suatu keputusan ditetapkan oleh pihak tertentu. Munculnya sebuah kebijakan dikarenakan adanya konflik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, sehingga dibuatlah kebijakan menjadi sebuah pedoman dan strategi dalam menjawab dan menangani persoalan atau konflik-konflik yang ada.

Penerapan kebijakan pendidikan dikatakan sebagai suatu hal yang krusial dikarenakan tahapan ini menjadikan kebijakan yang diberikan akan terlihat diterapkan dengan baik atau tidak. Dengan penerapan kebijakan pendidikan selanjutnya dapat dilakukan tahap evaluasi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah diterapkan. Dalam penerapan ini penting juga untuk memperhatikan tahapan-tahapan, pendekatan, dalam penerapan kebijakan pendidikan.

Adapun tujuan dari penerapan kebijakan pendidikan yaitu untuk menetapkan arah agar tujuan dari kebijakan dapat direalisasikan. Penerapan adalah salah satu faktor terpenting dari sebuah kebijakan, proses penerapan kebijakan menjadi penentu akhir yang sangat krusial dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan. Sebaik apapun formulasi dan rumusan kebijakan yang dihasilkan, tidak akan berarti jika tidak dilanjutkan dengan proses penerapan. Dalam penerapan kebijakan sendiri ada tiga pelaku yaitu: 1) Pembuat kebijakan, 2) Pelaksanan pelayanan publik, 3) Penerimaan layanan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi pustaka dengan menggunakan buku serta artikel-artikel ilmiah sebagai objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dari berbagai sumber, khususnya dari buku dan artikel yang berkaitan dengan “penerapan kebijakan pendidikan”. Selanjutnya data yang dikumpul dipilah, disajikan dan dianalisis sehingga hasilnya dapat diolah menjadi lebih singkat, efektif dan efisien. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu untuk menganalisis pesan yang disampaikan dalam sebuah data. Setelah proses penyaringan data untuk mengambil hal-hal penting yang akan menjadi poin pembahasan dan dicantumkan dalam artikel ini selesai selanjutnya akan ditelaah dan dikembangkan berdasarkan data-data pendukung penelitian ini sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Penerapan Kebijakan Pendidikan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan atau implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau perbuatan menerapkan. Penerapan ialah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam suatu keadaan yang riil atau nyata. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain berpendapat bahwa penerapan adalah suatu hal, cara, atau hasil. Majone dan Wildavski (1979) menyatakan penerapan atau implementasi adalah penilaian. Browne dan Wildavski (1983) juga berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling beradaptasi. Beberapa pengertian ini menunjukkan bahwa kata penerapan mencakup kegiatan, adanya tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Kata mekanisme memiliki arti bahwa penerapan tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi juga tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan dari sebuah aktivitas atau kegiatan (Afrinal, 2009: 3). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan baik secara individu ataupun berkelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Reyes (Nugroho, Riant, 2006: 23-37), ialah keputusan yang telah ditentukan sebelumnya atau standing decision yang memiliki ciri tertentu seperti konsistensi perilaku atau perbuatan dan pengulangan dalam kaitannya dengan objek dan subjek.

Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam sebuah negara. Salah satu hal yang pasti yaitu apapun kebijakannya selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada penerapan atau pelaksanaan tindakan. Terlepas dari apakah tindakan tersebut akhirnya dilaksanakan atau tidak.

Menurut Rusdiana, dalam pelaksanaannya, penerapan tidak terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan politik sebagai bagian dari prosedur rutin yang dikomunikasikan lewat jalur saluran birokrasi, tetapi penerapan lebih dari itu. Penerapan mencakup topik yang lebih luas seperti masalah konflik, keputusan, dan siapa yang diuntungkan dari pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa penerapan merupakan bagian yang sangat penting dari rangkaian proses pelaksanaan atau aplikasi di lapangan.

Inti terpenting dari penerapan kebijakan ialah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program divalidasi atau dibuat atau dicetuskan. Pemahaman ini termasuk upaya untuk mengadministrasikannya dan membeikan pengaruh nyata kepada masyarakat atau peristiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan harapan nantinya dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan.

## **2. Tujuan Penerapan Kebijakan Pendidikan**

Tujuan penerapan kebijakan pendidikan adalah untuk menentukan dan menetapkan arah dari penerapan tujuan kebijakan, dimana penerapan kebijakan dapat dimulai jika tujuan dari kebijakan sudah ditentukan atau disahkan, program yang diusulkan sudah disetujui, alokasi dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah turun atau diterima.

Dalam fase merumuskan tujuan dan membangun kebijakan penting untuk memperhatikan beberapa hal yang kemungkinan dapat menimbulkan akibat, karena jika kebijakan yang dibuat dengan tidak sesuai maka pasti akan berakhir dengan

kegagalan dan kebijakan tidak dapat diterapkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan yang sudah disusun dengan sedemikian rupa masih berpeluang gagal, semua itu tergantung bagaimana pembuat kebijakan menentukan strategi dan metode yang efektif dan efisien untuk menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan dinyatakan berhasil apabila dapat diaplikasikan atau diterima oleh khalayak umum, kemudian yang bisa diukur tingkat keefektifannya, dan bisa dilihat perubahannya setelah kebijakan tersebut diaplikasikan/diterapkan (Rasyidin, 2018).

### **3. Karakteristik Pembuatan Kebijakan Pendidikan**

Terdapat beberapa pendapat terkait karakteristik dari kebijakan pendidikan, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Subarsono (2013), yang berpendapat bahwa terdapat enam karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan pendidikan, yakni:

a) Adanya tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan sudah pasti harus mempunyai tujuan pendidikan, hanya saja tujuan disini harus lebih spesifik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan terarah dan jelas untuk turut serta dalam memecahkan masalah pendidikan.

b) Memenuhi aspek legal-formal

Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, tentu ada syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan yang disusun dapat diakui dan secara sah dapat diterapkan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan konstitusional hirarki ketatanegaraan di suatu wilayah sampai dapat dinyatakan sah dan resmi dapat digunakan di wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat diperkenalkan suatu kebijakan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c) Mempunyai konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum tentu wajib memiliki manfaat operasional agar nantinya bisa diaplikasikan/diterapkan, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang diharuskan untuk memperjelas pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Mengingat, kebutuhan akan kebijakan pendidikan merupakan fungsi pendukung dalam mengambil keputusan.

d) Dibuat oleh pihak berwenang

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli dibidangnya yang berwenang melakukannya, sehingga tidak merugikan pendidikan maupun diluar lingkungan pendidikan. Para pengelola lembaga pendidikan, administrator pendidikan juga para politisi yang terkait langsung dengan pendidikan adalah unsur yang setidaknya harus ada dalam membuat kebijakan pendidikan.

e) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tentu tidak terlepas dari keadaan riil yang harus ditindaklanjuti. Jika baik, maka dilanjutkan, dipertahankan dan dikembangkan, namun jika ternyata terdapat kesalahan maka kesalahan tersebut harus bisa di evaluasi atau diperbaiki.

f) Memiliki sistematika

Dikarenakan kebijakan juga merupakan sebuah sistem, maka diharuskan untuk memiliki sistematika atau pendekatan sistematik yang jelas terhadap segala aspek yang ingin diaturnya. Sistematika itu juga dituntut untuk memiliki efisiensi, efektivitas dan kesinambungan yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat diskrimintaif, pragmatis dan rapuh strukturnya disebabkan oleh beberapa faktor yang hilang atau saling bertentangan. Beberapa hal ini tentu harus diperhatikan dengan seksama agar pelaksanaannya tidak memunculkan kecacatan hukum secara internal. Selain itu, secara eksternal kebijakan pendidikan juga harus diintegrasikan dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter, kebijakan politik, terlebih kebijakan pendidikan yang berada di atasnya, maupun yang sejajar dan dibawahnya.

#### **4. Landasan Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Kebijakan pendidikan di Indonesia ialah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai titik tolak dari sistem pendidikan Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, mencakup UUD Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Pemerintah, dan lain-lain. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan:

- a) Dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
- b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
- c) Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa:
  - Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
  - Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
  - Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
  - Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
  - Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- d) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 yang berisi bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan kebijakan Pendidikan

Hal-hal yang akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan akan tergantung pada banyaknya faktor atau variabel yang masing-masingnya saling berhubungan (Amal, 2018). Edwards III berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi penerapan kebijakan, yakni:

### a) Komunikasi

Penerapan kebijakan dapat dilakukan secara efektif apabila penanggungjawab pencapaian tujuan kebijakan dapat memahami ruang lingkup serta tujuan kebijakan. berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana kebijakan.

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari aspek komunikasi ini, yakni:

- Penyiaran/Transmisi, adalah saluran komunikasi yang baik serta akan memberikan hasil penerapan yang baik.
- Informasi yang jelas, orang-orang yang melaksanakan kebijakan diharuskan untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipahami. Kejelasan informasi kebijakan tidak sellu menghalangi penerapan kebijakan, disatu sisi pelaksanaan membutuhkan keluwesan untuk menerapkan kebijakan, namun pada sisi lain hal tersebut dapat mendistorsi perencanaan yang akan dicapai.
- Konsistensi informasi yang disampaikan, artinya informasi yang diberikan selama pelaksanaan harus jelas dan konsisten agar dapat diterapkan. Perubahan yang sering terjadi pada perintah yang diberikan dapat mengakibatkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- Sumber daya, jika terdapat kekurangan sumber daya, maka pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik dan program tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

b) Sumber Daya

Aspek pengelolaan sumber daya ini meliputi jumlah personel atau tenaga kerja, kompetensi pelaksana, informasi yang berhubungan dan memadai untuk menerapkan kebijakan dan realisasi sumber daya yang memadai dalam penerapan program serta kewenangan untuk mengarahkan program apa adanya. Harapan dan tersedianya fasilitas pendukung yang dapat digunakan pelaksanaan program seperti pendanaan dan infrastruktur. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, sulit untuk melakukan pengawasan dengan baik dan program tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Jika para pelaksana kebijakan terbatas, maka keahlian dalam menerapkan kebijakan harus ditingkatkan.

c) Karakter/Disposisi

Yaitu karakter atau ciri khas dari pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan kepribadian demokratis. Para pelaksana merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Para pelaksana cenderung dengan senang hati melaksanakan kebijakan yang disetujuinya, namun jika memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, masalah biasanya ditemui dalam proses penerapan kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Memiliki keterkaitan dengan struktur organisasi dan ketepatan organisasi yang melaksanakan penerapan kebijakan. Karena struktur organisasi yang melakukan penerapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan.

## **6. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Penerapan Kebijakan Pendidikan**

Goggin mengasumsikan kebijakan sebagai suatu pesan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah federal (pusat). Keberhasilan penerapan pesan (kebijakan) tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga faktor berikut, yaitu (Purwanto&Sulistyastuti, 2012):

- a) Isi kebijakan, yang terdiri dari manfaat kebijakan, sumber daya dan ketertiban publik.
- b) Reputasi actor, yang mencakup legitimasi dan kredibilitas atau kehandalan aktor pemerintahan daerah.

- c) Format kebijakan, meliputi konsistensi kebijakan, kejelasan kebijakan dan penerimaan isi kebijakan.

Dalam bukunya yang berjudul *Bureauray and Policy Implementation* (Birokrasi dan Implementasi Kebijakan), Ripley dan Franklin memberikan pernyataan bahwa keberhasilan penerapan suatu kebijakan atau program dapat ditentukan oleh tiga faktor yakni (Wahab, 2008) :

- a) Compliance (Perspektif Kepatuhan)

Sederhananya, ketiga faktor diatas memberikan kepastian dalam menilai keberhasilan penerapan kebijakan, sehingga kekurangan atau hilangnya salah satu faktor sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang akan diterapkan.

Sedangkan Jan merse berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam penerapan kebijakan, yaitu (Hasbullah,, 2015):

- a. Isu Kebijakan

Isi kebijakan haruslah tegas dan jelas serta mencakup muatan politik yang memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders. Penerapan kebijakan memiliki kemungkinan gagal karena isi dan tujuan kebijakan yang belum jelas, pihak internal dan eksternal yang tidak tegas, atau karena kebijakan itu sendiri yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan terdapat kekurangan yang berkaitan dengan sumber daya pendukungnya.

- b. Informasi

Kurangnya informasi dapat dengan mudah memberi akibat pada deskripsi yang tidak akurat baik tentang tujuan kebijakan ataupun orang-orang yang melaksanakan isi dari kebijakan yang akan diterapkan dan hasil-hasilnya.

- c. Dukungan

Sangat sulit untuk menerapkan kebijakan jika tidak ada dukungan yang cukup untuk kebijakan tersebut, baik dukungan yang berupa dukungan fisik aupun non fisik. Dukungan ini juga terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan.

- d. Pembagian Potensi

Hal ini memiliki keterkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi diperlukan karena setiap pelaksana memiliki latar belakang dengan

keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Koordinasi menjadi tempat pertemuan dan bagian penting dari keberhasilan penerapan kebijakan.

Imron (2008) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan khususnya dibidang pendidikan, yakni:

- a. Kompleksitas seluruh kebijakan yang dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan maka akan semakin sulit dan memakan waktu dalam penerapannya. Terlebih rumusan kebijakan yang kompleks dapat memberikan akibat pada banyaknya peraturan, petunjuk penerapan dan petunjuk sistem atau metode penerapan yang harus dibuat. Kompleksitas juga sering menimbulkan multitafsir dari para pelaksana kebijakan.
- b. Rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan tidak jelas. Ambiguitas ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran dikalangan pelaksana jika penerapan kebijakan tidak sesuai dengan yang telah dirumuskan.
- c. Faktor berbagai sumber yang berpotensi yang dapat mendukung penerapan kebijakan. berbagai faktor ini harus ada agar kebijakan dapat diterapkan dengan sukses.
- d. Keahlian dari para pelaksana kebijakan. Penerapan kebijakan akan semakin baik beriringan dengan semakin profesionalnya para pelaksana kebijakan, baik secara teknis maupun secara administratif/manajerial.
- e. Dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan
- f. Faktor efisiensi dan efektivitas birokrasi. Kegagalan dalam menerapkan kebijakan terkadang disebabkan oleh birokrasi dan para aparatnya yang tidak mendukung dalam penerapan kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Peran kebijakan sendiri sangat krusial, karena dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan memberikan informasi yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan analisis, mengklasifikasi dan klarifikasi masalah yang mengungkap ketidaksesuaian tujuan dan upayanya, menyarankan kemungkinan baru dan menyarankan cara mengartikan ide atau gagasan kedalam suatu kebijakan yang mudah dilaksanakan dan diimplementasikan. Hal ini berhubungan dengan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan pranata sosial yang berwiawa dan teguh agar dapat memberdayakan warga Indonesia yang berkualitas dan proaktif untuk memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah.

Munculnya sebuah kebijakan dikarenakan adanya konflik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, sehingga dibuatlah kebijakan tersebut menjadi sebuah pedoman dan strategi dalam menjawab dan menangani persoalan atau konflik-konflik yang ada. Penerapan kebijakan pendidikan dikatakan sebagai suatu hal yang krusial dikarenakan tahapan ini menjadikan kebijakan yang telah diberikan akan terlihat diterapkan dengan baik atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan harapan nantinya dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan.

Tujuan penerapan kebijakan pendidikan untuk menentukan dan menetapkan arah dari penerapan tujuan pendidikan, dimana penerapan kebijakan dapat dimulai dengan jika tujuan dari kebijakan sudah ditentukan atau disahkan, program yang diusulkan sudah disetujui, alsokasi dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah turun atau diterima. Dalam fase merumuskan tujuan dan membangun kebijakan penting untuk memperhatikan beberapa hal yang kemungkinan dapat menimbulkan akibat, karena jika kebijakan yang dibuat dengan tidak sesuai maka pasti akan berakhir dengan kegagalan dan kebijakan tidak dapat diterapkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan yang sudah disusun dengan sedemikian rupa masih berpeluang gagal, semua itu tergantung bagaimana pembuat kebijakan menentukan strategi dan metode yang efektif dan efisien untuk menerapkan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B. K.. (2018). *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Kebijakan Pendidikan. Prosciding Seminar Nasional, 2, 516-518.* <http://semnasfis.unimed.ac>.
- Bule Tawa, Angelika. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional dan Implementasinya pada Sekolah Dasar.* 107-117.
- Imron, A. (2008). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putri Kholifah, Elisa, dkk.,. (2022). *Implementasi Kebijakan Pendidikan.* Implementasi Kebijakan Pendidikan, Al-Muaddib, 4, 2, 164-174.
- Rasyidin. (2018). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan.* 20-67.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan.pdf.*
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliah, Elih. (2020). *Implemntasi Kebijakan Pendidikan.* Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30, 2, 129-153.